

ABSTRAK

Daerah rawan bencana menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan karena dampak dari bencana tersebut dapat merugikan harta benda, ekonomi, dan munculnya korban jiwa. Keterbatasan lahan akibat pertumbuhan populasi yang pesat telah memaksa banyak negara untuk memanfaatkan wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi untuk tempat tinggal dan beraktivitas. Fenomena ini seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak dan keterbatasan pilihan untuk memiliki tempat tinggal. Selain itu keputusan masyarakat tetap tinggal pada kawasan rawan bencana yaitu akses ketergantungan masyarakat pada pekerjaan mereka. Ikatan sosial terhadap lingkungan juga menjadi salah satu faktor masyarakat enggan meninggalkan tempat yang telah lama menjadi identitas bagi mereka.

Salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bahaya bencana gunung berapi dan tumbuh berkembang aktivitas di dalamnya adalah kawasan Gunung Merapi khususnya pada Kabupaten Sleman. Setelah terjadinya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 silam, Kabupaten Sleman mengalami perubahan dan pertumbuhan yang cukup pesat terutama pada Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Cangkringan, dan Pakem. Perekonomian pariwisata Cangkringan terus meningkat dan rata-rata pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir mencapai 1,97%. Peningkatan ini memungkinkan adanya penambahan bangunan atau konstruksi yang membutuhkan lahan yang luas, sehingga memicu terjadinya perubahan jenis pemanfaatan lahan terlebih lagi di wilayah cepat tumbuh Kabupaten Sleman. Melihat dari kasus empiris maka perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana dengan pemantauan kesesuaian pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana.

Tujuan dari penelitian adalah memberikan upaya pengurangan risiko bencana berbasis penataan ruang khususnya pada wilayah cepat tumbuh di Kabupaten Sleman. Dalam mencapai tujuan tersebut pada penelitian ini akan dilakukan berbagai analisis spasial yaitu, analisis perubahan penggunaan lahan, analisis prediksi penggunaan lahan untuk 10 tahun mendatang, analisis risiko bencana, analisis kesesuaian penggunaan lahan Kabupaten Sleman dengan zona risiko bencana serta rencana tata ruang Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data yang dilakukan seluruhnya adalah sekunder dengan pengunduhan data dan analisis data yang berasal dari open source seperti USGS, BPS, Geoportal Sleman, dan Informasi Hukum.

Dari hasil analisis perubahan penggunaan lahan dalam 10 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2024, penggunaan lahan badan air terdapat perubahan sebesar -13 ha, terdapat penambahan hutan sebesar 1.079 ha. Penambahan penggunaan lahan perkebunan sebesar 2.014 ha Sedangkan pengurangan terbesar berada pada perkebunan sebesar -5.509 ha, serta perluasan permukiman 2.429 ha. Selanjutnya pada prediksi perubahan penggunaan lahan 10 tahun mendatang yaitu tahun 2024-2035 terdapat pengurangan badan air 228 ha, penambahan luas penggunaan lahan hutan sebesar 1.578 ha, pengurangan luas penggunaan lahan perkebunan sebesar -1.648 ha, penambahan luas tanaman pangan sebesar 35 ha diikuti dengan perluasan area permukiman sebesar 263 ha. Selain itu dari hasil analisis risiko bencana dengan menggunakan pemodelan UNDRR ditemukan bahwa risiko sangat tinggi tersebar pada zona KRB III yaitu Kecamatan Cangkringan, Turi, Pakem, dan Turi. Selanjutnya risiko tinggi dan risiko sedang sebagian besar berada pada Turi, Ngemplak, Depok, dan Gamping.

Dalam analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap risiko bencana ditemukan bahwa, Penggunaan lahan yang sangat berisiko terhadap bencana gunung berapi adalah permukiman yang berada di Kecamatan Cangkringan, Turi, dan Pakem. Selain itu berdiri beberapa destinasi wisata seperti kebun binatang dan beberapa penginapan di Kecamatan Pakem yang masih termasuk dalam zona risiko tinggi. Terdapat juga Merapi Golf Course dan wisata Lost World Castle yang juga termasuk dalam KRB III dan zona risiko tinggi di Kecamatan Cangkringan. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwasannya pada Kecamatan Cangkringan, Desa Umbulharjo, Desa Kepuharjo, dan Desa Glagaharjo dilarang untuk hunian dan Land Coverage Ratio paling banyak yaitu 5% dan tidak diperbolehkan adanya pertumbuhan (zero growth). Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang pada wilayah terkait dapat diberlakukan penerapan sanksi administratif yang dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis hingga denda administratif dan juga penutupan lokasi.

Kata Kunci: Pengurangan Risiko Bencana, Kawasan Cepat Tumbuh, Penataan Ruang, Kabupaten Sleman